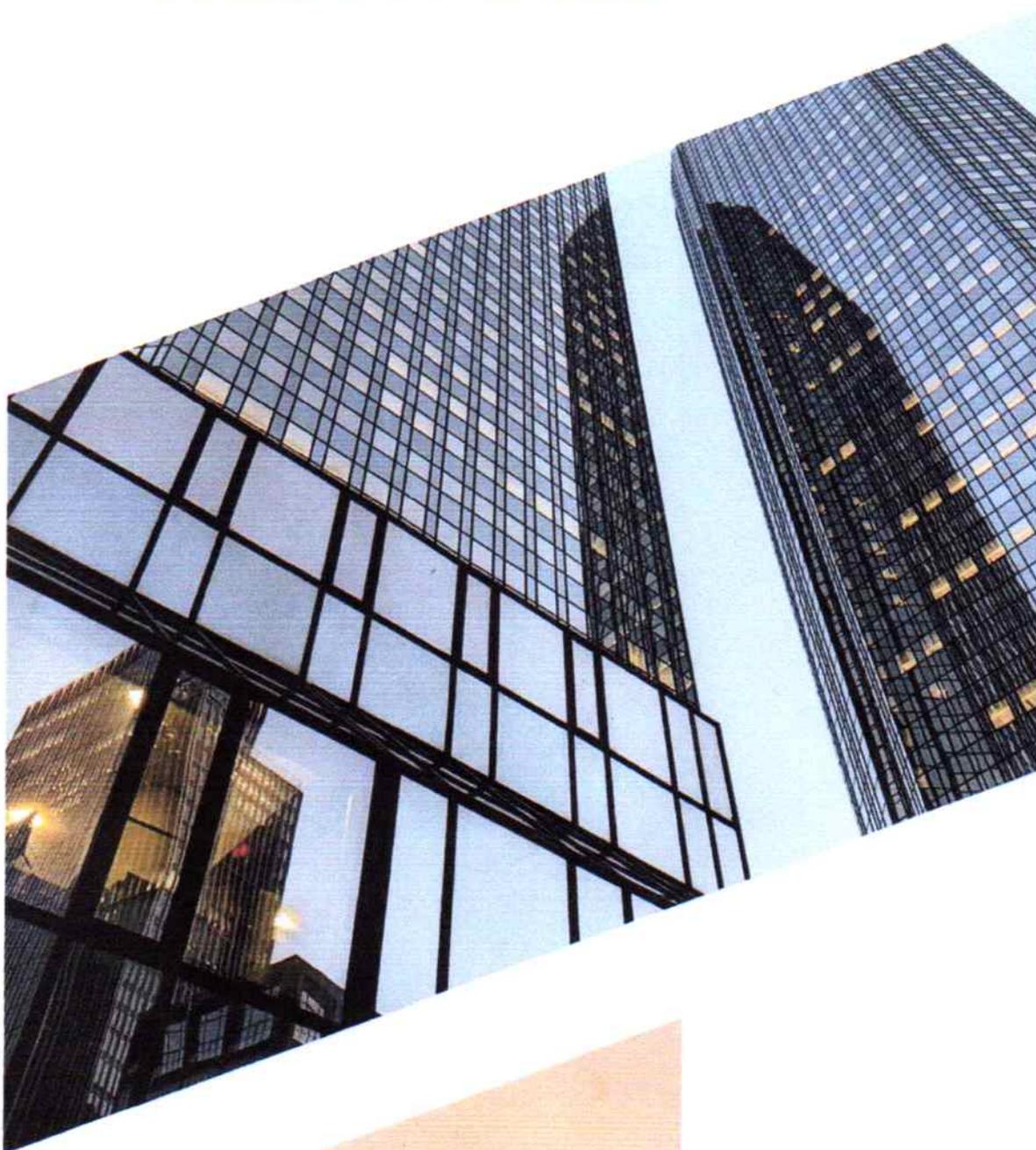




LKJIP

TAHUN 2022



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BLITAR**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan kekuasaanya sehingga dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2022. Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar selama tahun 2022 dengan hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja ini adalah berkat kerja keras seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan di Kota Blitar dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia dan anggaran yang ada.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sekaligus sebagai bahan perbaikan untuk kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang serta bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Blitar, Februari 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar



AGUS SUHERLI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196808081997031006

IKHTISAR RINGKASAN

Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sendiri menjalankan fungsi di antaranya:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar di dalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Blitar ditujukan untuk mewujudkan Misi Keempat Kota Blitar: **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sebagai tindaklanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melakukan kinerjanya guna mencapai sasaran strategis selama tahun 2022.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja sasaran strategis/kinerja utama yang didukung berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 dengan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 4.146.121.734 (Empat Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah)**, yang penjabarannya tersaji pada tabel alokasi anggaran belanja dan realisasinya di bawah ini:

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.192.975.695	1.039.082.616,08	87,10
1.1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	338.658.130	326.912.366,08	96,53
1.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	135.042.560	130.261.400	96,46
1.1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	203.615.570	196.650.966,08	96,58
1.2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	627.343.600	496.828.300	79,20
1.2.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	627.343.600	496.828.300	79,20
1.3.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	226.973.965	215.341.950	94,87

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

1.3.1	Kerjasama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	226.973.965	215.341.950	94,87
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.953.146.039	2.740.380.519,20	92,80
2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.001.300	50.190.600	96,52
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.510.200	8.510.200	100
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.510.200	33.229.900	99,16
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.980.900	8.450.500	84,67
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	999.287.168	958.631.474	95,93
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	991.518.168	950.862.474	95,90
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	7.769.000	7.769.000	100
2.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.994.200	85.155.900	99,02
2.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	85.994.200	85.155.900	99,02
2.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.275.735.652	1.218.314.171	95,50
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi	21.859.400	21.843.000	99,92

EXECUTIVE SUMMARY

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	944.334.602	901.903.700	95,50
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.196.600	60.697.600	99,18
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.836.650	47.260.700	98,80
2.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.051.400	39.051.400	100
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	300.000	4,03
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.017.000	147.257.771	95,61
2.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.144.942	102.002.419,20	53,37
2.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.392.542	14.917.143	34,38
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.752.400	87.085.276,20	58,94
2.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.982.777	326.085.955	93,44
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.769.377	61.856.655	74,73
2.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.474.100	10.340.000	98,72

EXECUTIVE SUMMARY

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

2.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.140.000	239.290.000	99,23
2.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.599.300	14.599.300	100
JUMLAH		4.146.121.734	3.779.463.135,28	91,16

Selanjutnya capaian sasaran strategis dijabarkan melalui tabel sebagai berikut:

No	Sasaran		Capaian Kinerja	Keterangan
	Uraian	Indikator		
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,40	Kategori Sedang
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85,54)	Nilai Bersama Bakesbangpol

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
E. Aspek-aspek Strategis	8
F. Isu-isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis 2021 – 2026	12
B. Perjanjian Kerja Tahun 2022	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengukuran Capaian Kinerja/Sasaran	15
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022	16
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022	18
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra	19
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)	19
B. Akuntabilitas Keuangan	25
1. Alokasi Anggaran Belanja Per Sasaran Pembangunan	29

	2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	29
	3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
	C. Prestasi / Penghargaan	32
BAB IV	PENUTUP	33
	A. Kesimpulan	33
	B. Langkah Perbaikan	34

Lampiran-lampiran :

- A. Matriks Rencana Strategis OPD Tahun 2021 – 2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar	4
------------	---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Aspek-aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2022	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2022	14
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2022	16
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2022	18
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	19
Tabel 3.4	Target Capaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2022	20
Tabel 3.5	Data Jumlah Penduduk di Kawasan rawan Bencana yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana tahun 2022	22
Tabel 3.6	Data Jumlah Korban Kebencanaan di Kota Blitar tahun 2022	24
Tabel 3.7	Data Layanan PusdalOps PB di Kota Blitar tahun 2022	24
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja	25
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Belanja untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar tahun 2022	26
Tabel 3.10	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Pembangunan Tahun 2022	29
Tabel 3.11	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2022	30
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme evaluasi dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah menempatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat tingkat keberhasilan atau bahkan sebuah kegagalan terhadap program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Permen-PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap akhir tahun anggaran sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan selama satu tahun anggaran.

Di samping sebagai kewajiban, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada hakekatnya merupakan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas, dalam arti mengalami peningkatan/penurunan, baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Dapat dikatakan pula bahwa LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022 sendiri dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah. Di dalamnya, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan

tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar diharapkan dapat menjadi:

1. Umpan balik bagi peningkatan kinerja;
2. Wahana untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
3. Daya dorong (*supporting unit*) bagi OPD lain untuk menyelenggarakan tugas umum dan pembangunan daerah secara baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, sebagai Organisasi Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Blitar melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan trantibum serta perlindungan masyarakat sub-bidang/urusan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

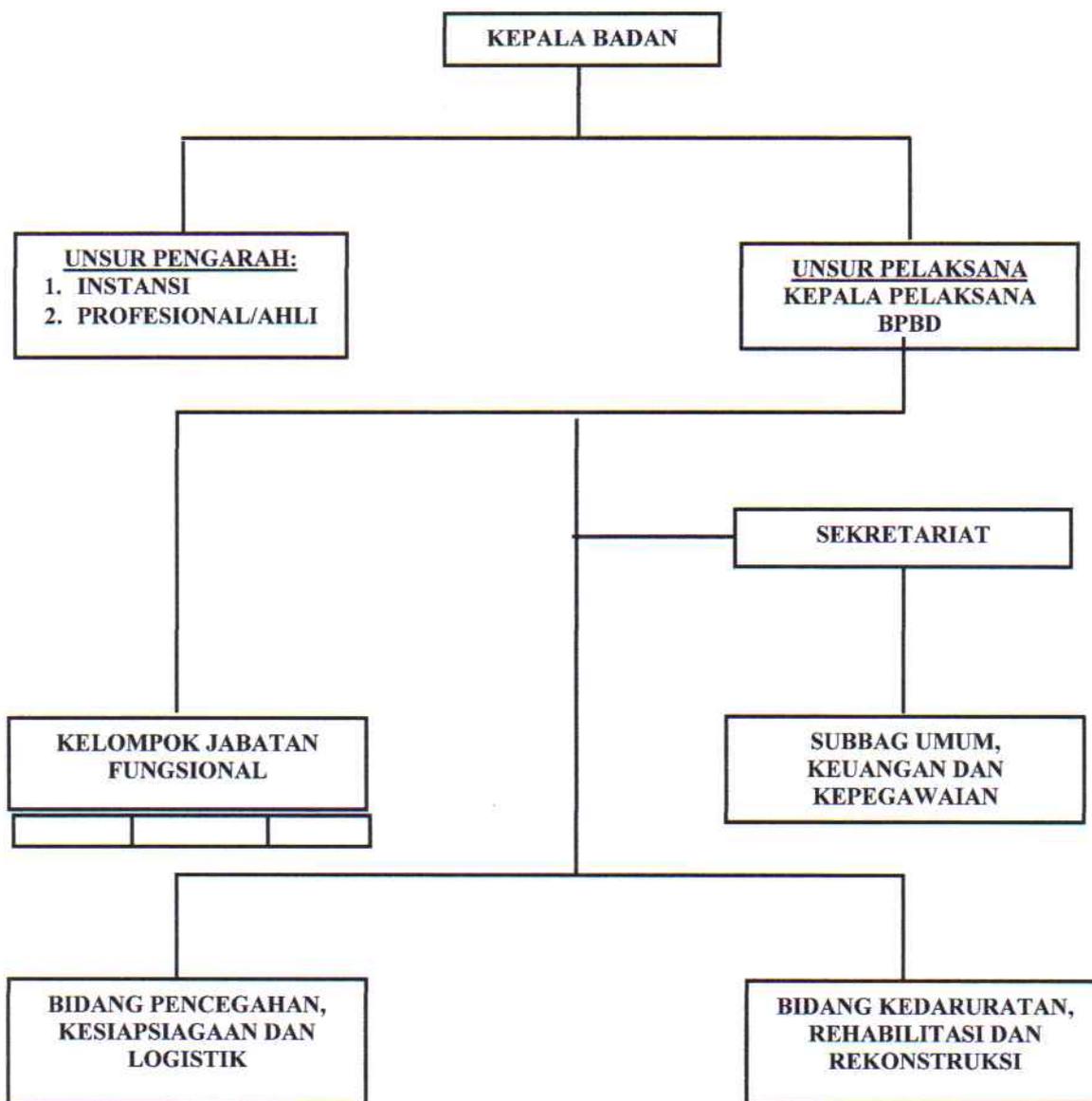
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar juga menjalankan tugas atau kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Menetapkan prosedur penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Menetapkan prosedur penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
7. Melaksanakan penataan sistem dasar penanggulangan bencana;
8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
9. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
10. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
11. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, 2 (dua) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, Unsur Pelaksana, dan Unsur Pengarah, sebagaimana diterangkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar
(Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022)



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar, terdiri dari:

- Kepala Badan.
- Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana BPBD), membawahi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Unsur Pengarah (Instansi dan Profesional/Ahli)
- Sekretariat Dinas, membawahi:
 - Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.
- Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik.
- Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dan sarana untuk mengkomunikasikan serta menjawab apa yang telah ditargetkan dan sekaligus menggambarkan bagaimana proses pencapaiannya pada tahun 2022.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk memeberikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian target sasaran tahun anggaran 2022 serta sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek-aspek Strategis

Aspek-aspek strategis yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, meliputi:

Tabel 1.1
Aspek-aspek Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022

No	Aspek Internal	Aspek Eksternal	Tantangan	Peluang
1	Program kerja OPD yang tersusun	Tersedianya pelayanan informasi rawan bencana	Kendala sosialisasi paradigma baru karena masih banyaknya masyarakat belum memahami pentingnya kegiatan penanggulangan bencana	Penyempurnaan dan pembaharuan landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dari tingkat pusat hingga daerah
2	Telaksananya inventarisasi, pengolahan, penyajian dan pemeliharaan data	Tersedianya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Besarnya kebutuhan pengembangan kapasitas yang merupakan kemampuan internal organisasi dalam penanggulangan bencana	Terbentuknya BPBD sebagai lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah
3	Tersedianya pengendalian, monitoring, dan evaluasi program	Tersedianya pelayanan penyelamatan dan evakuasi	Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana karena	Semakin besarnya perhatian dari Pemerintah maupun

		korban bencana	masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana	masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal pengurangan resiko bencana
4	Laporan akuntabilitas yang tersusun	Pelaksanaan rekomendasi protokol kesehatan	Kendala koordinasi dengan instansi terkait di dalam tindak lanjut penanganan bencana pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi; saat ini masih sebatas pada proses tanggap darurat	Semakin besarnya perhatian dunia internasional terhadap penanggulangan bencana
5	Perbendaharaan keuangan yang tersusun		Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana	Masih memungkinkannya pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan pegawai
6	Terlaksananya verifikasi anggaran			Mulai tingginya koordinasi dan Kerjasama antar pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>)
7	Pertanggungjawaban anggaran yang tersusun			
8	Pengelolaan kearsipan			
9	Penyelenggaraan kerumahtanggaan			
10	Pengelolaan data kepegawaian			

F. Isu-isu Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam melaksanakan urusannya, permasalahan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bencana;
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana yang memadai dan sesuai dengan standar minimal BNPB;
3. Belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berbasis pengurangan resiko bencana;
4. Belum optimalnya sosialisasi terhadap masyarakat maupun komunitas dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana; dan
5. Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli geografi/geologi dalam penanggulangan bencana.

Sementara, isu-isu strategis yang terkait dengan kebencanaan di antaranya:

1. Peningkatan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
2. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana yang memadai sesuai dengan standar minimal BNPB;
3. Mengedukasi masyarakat agar dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana dengan membentuk kelurahan tangguh bencana;
4. Peningkatan kapasitas SDM, baik secara mandiri maupun dengan mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi;
6. Peningkatan fasilitas bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi

kerusakan korban terdampak; dan

7. Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha melalui program CSR, baik pada fase pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca-bencana.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2022 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan. Sehingga, tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2022 dan seterusnya dapat mendukung perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar.

Visi Kota Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat”***.

Adapun Misi Kota Blitar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
3. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
4. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Visi dan Misi Kota Blitar tersebut kemudian menghasilkan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Erat kaitannya dengan pencapaian Visi dan Misi Kota Blitar tersebut, maka dokumen perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar harus dapat mengintegrasikan

kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam Rencana Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar.

Adapun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran pada Misi Keempat Kota Blitar: **Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan**, dan berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar kemudian diuraikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022

TUJUAN		SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan Terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar adalah penjabaran dari sasaran strategis dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar dalam pelaksanaan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2022.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan Kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan atau kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022 diuraikan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0.53
2.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80)

No.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Program Penanggulangan Bencana	1.192.975.695	DAU
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.953.146.039	DAU
	J U M L A H	4.146.121.734	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan untuk Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan.

A. Pengukuran Capaian Kinerja /Sasaran

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program/kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Blitar tahun 2022, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Capaian indikator kinerja diperoleh dari perbandingan rencana dengan realisasi berdasarkan data-data pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasinya menggambarkan pencapaian indikator kinerja yang semakin baik. Hasil atas pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tersaji pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS

KINERJA UTAMA/TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,53	0,40
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat Daerah	A (84,97)	A (85,54)

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

A. Indeks Kapasitas Daerah

IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Dari IKD, setiap daerah mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 BPBD Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pengukuran IKD dengan metodologi pengukuran untuk Kapasitas Provinsi Jawa Timur adalah agregat dari kapasitas OPD/Instansi/Lembaga Kabupaten Kota (C1) dan kapasitas Provinsi OPD/Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Timur (C2)

$$\text{Kapasitas Jawa Timur} = (60\% \times C1) + (40\% \times C2)$$

Dari 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator ketangguhan daerah yang dikelompokkan ke dalam 7 prioritas dengan bobot/agregat yang berbeda-beda, meliputi :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 6%)
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 6%)
3. Pengembangan system informasi, diklat dan logistic (bobot : 7,5%)
4. Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 10,5%)
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 21%)
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 35%)
7. Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 14%)

Akumulasi dari nilai tiap-tiap prioritas akan menghasilkan nilai “Indeks Ketahanan Daerah” dengan range kelas :

$IKD < 0,4$: Rendah

$0,4 < IKD < 0,8$: Sedang

$IKD > 0,8$: Tinggi

Hasil Pengukuran terhadap IKD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

- Penguatan kebijakan dan kelembagaan (bobot : 0,75%)
- Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu (bobot : 0,80%)
- Pengembangan system informasi, diklat dan logistic (bobot : 0,59%)
- Penanganan tematik Kawasan rawan bencana (bobot : 0,65%)
- Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana (bobot : 0,32%)
- Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana (bobot : 0,27%)
- Pengembangan sistem pemulihan bencana (bobot : 0,20%).

Sehingga capaian Indeks Kapasitas Daerah Kota Blitar tahun 2022 : **0,40**. Hal ini dikandung maksud kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana dan terpadu dikategorikan **SEDANG**. Capaian ini bisa dikatakan belum memenuhi target. Adapun permasalahan yang muncul adalah belum adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang

penanggulangan bencana serta minimya bukti dukung dari OPD dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah, Sehingga diperlukan Kerjasama sekaligus penekanan kepada OPD tentang pentingnya pemenuhan dokumen untuk pengisian IKD.

B. Sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Realisasai capaian Nilai SAKIP OPD, Badan Penggulangan Bencana Daerah masih mengikuti nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengingat yang dilakukan evaluasi adalah akuntabilitas dan kinerja tahun 2021, ketika Badan Penggulangan Bencana Daerah masih menjadi Bidang Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD.

Tabel 3.2

2.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 - 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	NA	0,31	0,53	0,40
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	A	84,96	84,97	85,54

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

Pada tahun 2021 tidak terdapat data target Indeks Kapasitas Daerah dikarenakan tidak menjadi indikator kinerja, namun bisa dilihat berdasarkan hasil pengukuran adalah : 0,31. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,40.

Nilai SAKIP OPD merupakan nilai Bersama Bakesbangpol dengan perolehan nilai di tahun 2022 : 85,54 meningkat dari tahun sebelumnya 84,96.

Tabel 3.3

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Kinerja Tahun 2022		Tingkat kemajuan
			Target	Realisasi	
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,61	0,53	0,40	65,57
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	84,97	85,54	100,64

Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan pada akhir Renstra, diperlukan adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana serta Kerjasama sekaligus penekanan kepada OPD tentang pentingnya pemenuhan dokumen untuk pengisian IKD.

Nilai SAKIP OPD merupakan nilai bersama Bakesbangpol.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Blitar adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Tabel 3.4

TARGET PENCAPAIAN SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2022	Target Nasional	Keterangan
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2021, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2022

2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2021, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2022
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Telah Dicapai Tahun 2021, Dipertahankan Capaiannya pada Tahun 2022

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam.

Pada tahun 2022, pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dengan melanjutkan program dan kegiatan pada tahun 2021, yaitu kegiatan informasi bencana alam dan penanganan masalah COVID-19. Kegiatan dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial, media elektronik. Di samping itu juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terlatih per jenis bencana.

Tabel 3.5

DATA JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA BAHAYA GEMPA BUMI, CUACA EKSTRIM, DAN KEBAKARAN GEDUNG-PEMUKIMAN KOTA BLITAR TAHUN 2022

NO.	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK DI KAWASAN RAWAN BENCANA YANG MEMPEROLEH INFORMASI RAWAN BENCANA	JUMLAH WARGA DAERAH RAWAN BENCANA
1	KAUMAN	156	156
2	PAKUNDEN	2	2
3	KEPANJENLOR	95	95
4	TANGGUNG	150	150
5	SUKOREJO	729	729
6	BLITAR	100	100
7	BENDO	114	114
8	NGADIREJO	18	18
J U M L A H		1364	1364
PERSENTASE		100 %	

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2022 adalah Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dibanding Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yaitu $1364 / 1364$ sebesar 100%

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau

disesuaikan dengan jenis bencana yang ada.

Pada tahun 2022, selain tetap melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, juga difokuskan pada penanganan bencana non-alam berwujud pandemic COVID-19 dan wabah PMK. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa : SPAB, Peran Perempuan dalam Penanggulangan Bencana, KELTANA, Simulasi Penanganan Bencana. Pelayanan ini diberikan kepada warga negara dan/atau penduduk di Kawasan rawan bencana.

Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2022 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu 1364 / 1364 sebesar 100%.

No.	UNSUR	JUMLAH
1	Simulasi Penanganan Bencana	100
2	Peran Perempuan dalam Penanggulangan Bencana	100
3	KELTANA	649
4	SPAB	515
TOTAL		1364

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2022 adalah 100% yaitu 677/677 yang diperoleh dari jumlah korban kejadian bencana yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibanding jumlah korban kejadian bencana.

Tabel 3.6

**DATA JUMLAH KORBAN KEBENCANAAN
 DI KOTA BLITAR TAHUN 2022**

NO.	UNSUR	JUMLAH KORBAN (ORANG)	JUMLAH KORBAN YANG BERHASIL DITANGANI (ORANG)
1	LAPORAN TANAH LONGSOR	0	0
2	LAPORAN GEMPA	0	0
3	LAPORAN ANGIN KENCANG	3	3
4	LAPORAN BANJIR	0	0
5	LAPORAN COVID-19	228	228
6	LAPORAN PMK	446	446
	JUMLAH	677	677
	PERSENTASE	100 %	

Pada tahun 2022 ini Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa sebagaimana pada tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7

**DATA LAYANAN PUSDALOPS
 DI KOTA BLITAR TAHUN 2022**

NO.	LAYANAN KEBENCANAAN	JUMLAH KEJADIAN
1	ANGIN KENCANG	2
2	HUJAN DERAS DISERTAI ANGIN KENCANG	1
3	POHON TUMBANG	20
4	TALUD AMBROL	6

5	BANJIR LUAPAN	7
6	TEBING LONGSOR	2
7	TANAH LONGSOR	1
8	DAHAN PATAH	1
9	TANAH AMBLES	1
10	COVID-19	57
11	PMK	446
	JUMLAH	544

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2022 jumlah anggaran belanja terperinci secara garis besar sebagai berikut:

- 1 Belanja Operasi : Rp. 3.203.216.832
 - 2 Belanja Modal : Rp. 942.904.902
- Jumlah Belanja Daerah Rp. 4.146.121.734**

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Operasional	3.203.216.832	2.879.602.135,28	89,90
2.	Belanja Modal	942.904.902	899.861.000	95,43
	J U M L A H	4.146.121.734	3.779.463.135,28	

Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp 3.779.463.135,28**.

Adapun khusus untuk anggaran dan realisasi belanja langsung program/kegiatan tahun 2022 tersebut dipaparkan melalui Tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran untuk Setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No.	URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB-KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.192.975.695	1.039.082.616,08	87,10
1.1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	338.658.130	326.912.366,08	96,53
1.1.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	135.042.560	130.261.400	96,46
1.1.2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	203.615.570	196.650.966,08	96,58
1.2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	627.343.600	496.828.300	79,20
1.2.1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	627.343.600	496.828.300	79,20
1.3.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	226.973.965	215.341.950	94,87
1.3.1	Kerjasama Antar-Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	226.973.965	215.341.950	94,87
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	2.953.146.039	2.740.380.519,20	92,80

	PEMERINTAHAN DAERAH			
2.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52.001.300	50.190.600	96,52
2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.510.200	8.510.200	100
2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.510.200	33.229.900	99,16
2.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.980.900	8.450.500	84,67
2.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	999.287.168	958.631.474	95,93
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	991.518.168	950.862.474	95,90
2.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	7.769.000	7.769.000	100
2.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85.994.200	85.155.900	99,02
2.3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	85.994.200	85.155.900	99,02
2.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.275.735.652	1.218.314.171	95,50
2.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.859.400	21.843.000	99,92
2.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	944.334.602	901.903.700	95,50
2.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	61.196.600	60.697.600	99,18
2.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.836.650	47.260.700	98,80
2.4.5	Penyediaan Barang	39.051.400	39.051.400	100

	Cetakan dan Penggandaan			
2.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.440.000	300.000	4,03
2.4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.017.000	147.257.771	95,61
2.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.144.942	102.002.419,20	53,37
2.5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.392.542	14.917.143	34,38
2.5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.752.400	87.085.276,20	58,94
2.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.982.777	326.085.955	93,44
2.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.769.377	61.856.655	74,73
2.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.474.100	10.340.000	98,72
2.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.140.000	239.290.000	99,23
2.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.599.300	14.599.300	100
JUMLAH		4.146.121.734	3.779.463.135,28	91,16

1. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Alokasi anggaran belanja per sasaran pembangunan yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2022 dapat digambarkan melalui Tabel 3.10 sebagai berikut:

Tabel 3.10

No	Sasaran		Anggaran	
	Uraian	Indikator	Rp	%
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	1.192.975.695	28,77
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	2.953.146.039	71,23
TOTAL			4.146.121.734	100

Total alokasi anggaran untuk kedua sasaran pembangunan adalah Rp 4.146.121.734 dengan rincian untuk sasaran pembangunan pertama : Meningkatkan Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana dengan anggaran Rp 1.192.975.695 atau 28,77%. Sasaran kedua: Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 2.953.146.039 atau 71,23%.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran belanja yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun 2022 dapat disimak pada Tabel 3.11 sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Belanja Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1: Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,56	0,40	71,43			
Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,53	0,40	75,48	1.192.975.695	1.039.082.616,08	87,10
Program : Program Penanggulangan Bencana	1. Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih	91 %	66 %	72,53			
	2. Jumlah kelurahan tangguh bencana kategori madya	1 kelurahan	1 kelurahan	100 %			
	3. Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penengangan bencana	40 %	40 %	100 %			

	4. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	100 %	100 %			
Tujuan 2: Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,97	85,54	100,68			
Sasaran 2: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,97	85,54	100,68	2.953.146.039	2.740.380.519,20	92,80
Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (79)	Baik (84,08)	106,43			

Pada Program Penanggulangan Bencana persentase realisasi anggaran sebesar 87,10 % dikarenakan capaian tergantung pada fasilitasi penanganan bencana.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.12

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4/5
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	75,48	87,10	0,87
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,68	92,80	1,08

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam pencapaian indikator kinerja tahun 2022, indikator Indeks Kapasitas Daerah mempunyai tingkat efisiensi 0,87; indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah mempunyai tingkat efisiensi 1,08.

C. Prestasi / Penghargaan

- Tim pemakaman SOP Covid 19 (Tentara Langit) sebagai Lembaga dan / atau Organisasi Perangkat Daerah yang berpartisipasi aktif menangani Covid 19 dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 di Kota Blitar
- Partisipasi dan dukungan pada Diklat Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPA) dan Simulasi BLS (Basic Life Support) Arisan Nol Rupiah di RS Islam Aminah Blitar
- Tentara Langit Kota Blitar peran serta dalam percepatan penanganan pandemic Covid 19 di Kota Blitar

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar pada tahun anggaran 2022 yang didasarkan pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong perwujudan *good governance*. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan kinerja.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022 dapat dikatakan baik walaupun masih dijumpai adanya kendala/hambatan di dalam pelaksanaannya, Namun, di dalam pelaksanaannya pada masa mendatang dirasa akan dapat ditingkatkan dan diharapkan memperoleh hasil yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian dua indikator kinerja utama /sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2022.

sasaran 1. Meningkatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana

Target : 0,53 Realisasi : 0,40 Capaian kinerja : 75,48

Untuk mencapai target Indeks yang telah ditentukan diperlukan adanya kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana serta Kerjasama sekaligus penekanan kepada OPD tentang

pentingnya pemenuhan dokumen untuk pengisian IKD

Sasaran 2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Target Nilai SAKIP perangkat Daerah 84,97. Realisasi : 85,54. Capaian Kinerja : 100,68

Target dan Realisasai Nilai SAKIP Perangkat Daerah masih mengikuti nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, mengingat yang dilakukan evaluasi adalah akuntabilitas dan kinerja tahun 2021, ketika Badan Penggulangan Bencana Daerah masih menjadi Bidang Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PBD.

B. Langkah Perbaikan

Langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan fungsi koordinatif BPBD Kota Blitar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk merangkul semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik di internal pemerintah maupun lembaga-lembaga terkait kebencanaan, swasta dan masyarakat;
- b. Menyusun kebijakan/regulasi/peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar. Semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar sepanjang tahun anggaran 2022.

Blitar, Februari 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Blitar



AGUS SUHERLI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 196808081997031006

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026**

VISI : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat

MISI : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN										SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	Nilai Indeks	NA	NA	0,56	0,58	0,60	0,62	0,65	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	Nilai Indeks	NA	NA	0,53	0,55	0,57	0,59	0,61	Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi bencana	1. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana 2. Peningkatan kelurahan Tangguh bencana 3. Peningkatan sarana prasarana pendukung penanganan bencana 4. Optimalisasi koordinasi penanganan bencana 5. Pemenuhan prasyarat ketahanan daerah	

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

TUJUAN										SASARAN								CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET		
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET						STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
2. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil Nilai SAKIP perangkat daerah	NA	NA	A (80)	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Hasil Nilai SAKIP perangkat daerah	NA	NA	A (80)	A (80)	A (80)	A (80)	A (80)	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah					

Blitar, Februari 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Blitar


AGUS SUNERLI, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680308 199703 1 006



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

RENCANA KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR

TUJUAN : 1.Meningkatnya kapasitas ketangguhan terhadap bencana

2.Meningkatnya tata Kelola perangkat daerah

INDIKATOR: 1.Indeks Ketahanan Daerah

2.Nilai SAKIP Perangkat Daerah

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	0,53	Program penanggulangan bencana	1.Persentase SDM penanganan bencana yang terlatih 2. Jumlah kelurahan Tangguh bencana kategori madya 3.Persentase kelengkapan sarana prasarana pendukung penenganan bencana 4. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	91 % 1 kel 40 % 100 %	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Persentase kompetensi SDM penanganan bencana yang terlatih 2. Persentase kelurahan yang diusulkan kelurahan tangguh bencana kategori madya 3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 4. Persentase pemanfaatan sarana prasarana	86 % 4,7 % 100 % 40 %	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1. Jumlah peserta pembekalan pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam 2. Jumlah pendampingan kelurahan tangguh 3. Jumlah penyebaran informasi kebencanaan	370 org 21 kel 4 jenis	135.042.560
										Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	1. Jumlah peserta rapat koordinasi PUSDALOPS PB dan penanganan	250 org	203.615.570

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

							pendukung penanganan bencana		Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	kejadian	3 jenis		
						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2. Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang tersedia Jumlah logistik untuk Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	12 jenis	627.343.600	
						Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun	25 %	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah peserta rakor antar lembaga dalam penanganan bencana Jumlah dokumen penanggulangan bencana	170 orang 2 dokumen	226.973.965	
2.	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	A (80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (79)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah jenis dokumen pelaporan yang tersusun	11 dok 9 dok	8,510,200 33,510,200

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

							Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	1 dok	9,980,900			
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	13 ASN	991,518,168
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun (Bulanan/Triwulanan/Semesteran) yang disusun	5 dok	7,769,000
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 event	85,994,200
										Jumlah Publikasi Program/kegiatan Perangkat Daerah	3 jenis		
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6 komponen	21,859,400
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	37 jenis	944,334,602

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022

									Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	10 jenis		
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	30 jenis	61,196,600
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	1100 dos	47,836,650
								Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		43 jenis		
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	8 cetakan	39,051,400
								Jumlah lembar penggandaan		28473 lembar		
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	3 bahan bacaan	7,440,000
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	50 rakor	154,017,000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100 %	43,392,542
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 rekening	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
 TAHUN 2022

								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang <u>terbayarkan</u> , Jumlah tenaga kebersihan yang <u>terbayarkan</u> Jumlah tenaga penunjang perkantoran yang tersedia	12 kali 1 org 4 org	147,752,400
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100 %	82,769,377
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	14 unit	
									Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	5 unit	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	10 jenis	10,474,100
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1 unit	241,140,000

PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SUHERLI, S.H.

Jabatan : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR



Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah



AGUS SUHERLI, S.H.
Pembina Tk. 1
NIP. 196808081997031006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.00 (nilai)
2	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menghadapi Bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0.53 (angka)

No	PROGRAM	Anggaran	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.953.146.039,00	DAU
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.192.975.695,00	DAU dan DID
	JUMLAH	4.146.121.734,00	

WALIKOTA BLITAR



Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah



PENGUKURAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Tahun : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Indeks kapasitas daerah	Nilai Indeks	0,53	0,40		1. Minimya bukti dukung dari OPD dalam pemenuhan dokumen pendukung Indeks Kapasitas Daerah (IKD) 2. Belum adanya kebijakan/ regulasi /peraturan daerah yang mengatur tentang penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	1.192.975.695	1.039.082.616,08	87,10	Capaian Realisasi tergantung pada fasilitasi penanganan bencana
2	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai Indeks	A (84,97)	85,54		Nilai Bersama Bakesbangpol, karena yang dilakukan evaluasi adalah akuntabilitas dan kinerja tahun 2021, ketika BPBD masih menjadi bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan bagian dari Bakesbangpol	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	2.953.146.039	2.740.380.519,20	92,80	

Blitar, Februari 2023
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Blitar



AGUS SUHERLI, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19680808 199703 1 006